



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 11%

Date: Friday, August 13, 2021

Statistics: 533 words Plagiarized / 5054 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

569 PERSPEKTIF, 10 (2) (2021):569-577 DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.4850 PERSPEKTIF Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif> Praktik Paradiplomasi dalam Implementasi Kerjasama Smart City Pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul Paradiplomation Practices in the Implementation of Smart City Collaboration between the Government of the City of Bandung and the City of Seoul Renny Candradewi Puspitarini¹, Fahrisyah Tiko Septiarika² & Randy Bramastya³ ¹Universitas Panca Marga Probolinggo, Indonesia ² Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Indonesia ³Universitas Airlangga, Indonesia Diterima:01 Februari 2021; Direview: 03 April 2021; Disetujui: 11 Mei 2021 Abstrak Paradiplomasi populer di awal tahun 1980-an, ketika pemerintahan Kota Quebec memperkuat kerjasama dengan pemerintahan daerah negara lain maupun aktor negara lain dalam hubungan internasional.

Fenomena ini dikaji secara mendalam oleh pakar diplomasi yakni Duchacek dan Soldatos yang kemudian praktiknya semakin luas diimplementasikan dalam hubungan transnasional negara-negara di dunia. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menjalani tahapan-tahapan perumusan kerjasama smart. Proses penting dalam paradiplomasi ialah terjadinya komunikasi yang tertuang dalam proses advokasi kebijakan dari pemerintah Kota Seoul melalui lembaga Knowledge Sharing Program (KSP) di bawah Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemerintah Kota Bandung sebagai entitas subnational government melakukan diplomasi di luar konteks diplomasi tradisional yakni paradiplomasi dalam mengimplementasikan kerjasama Smart City dengan Kota Seoul pada tahun 2016-2019. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan bermanfaat

untuk mengumpulkan informasi sekunder yang dibutuhkan guna mendukung temuan dalam penelitian. Penelitian ini menghasilkan peta kerjasama antara Kota Seoul dan Kota Bandung yang belum dibahas dalam penelitian serupa menggunakan kerangka paradiplomasi yang menggabungkan konsep Duchacek, Soldatos dan Keohane.

Peta kerjasama dimaksud yakni penjelasan mendalam tentang smart city Kota Bandung yang meliputi Smart Branding, Smart Living, Smart Environment dan Smart Government. Kata kunci: Paradiplomasi; Kerjasama; Smart City; Sister City; Subnational Government
Abstract Paradiplomacy was popular in the early 1980s, when the Quebec City government strengthened cooperation with regional governments of other countries and other state actors in international relations. This phenomenon was studied in depth by diplomacy experts, namely Duchacek and Soldatos, which was later implemented in practice in transnational relations between countries in the world.

The same thing was done by the city government of Bandung. The Bandung City Government undergoes the stages of smart collaboration formulation. An important process in paradiplomacy is the occurrence of communication contained in the policy advocacy process of the Seoul City government through the Knowledge Sharing Program (KSP) under the Ministry of Economy and Finance of South Korea. This study aims to see the Bandung City government as a subnational government entity conducting diplomacy outside the context of traditional diplomacy, namely paradiplomacy in implementing Smart City cooperation with the City of Seoul in 2016-2019.

This research was conducted using a qualitative approach with literature study methods. The literature study method is useful for gathering secondary information needed to support findings in research. This study produces a map of cooperation between the City of Seoul and the City of Bandung which has not been discussed in a similar study using a paradiplomation framework that combines the concepts of Duchacek, Soldatos and Keohane. The cooperation map referred to is an in-depth explanation of the smart city of Bandung which includes Smart Branding, Smart Living, Smart Environment and Smart Government.

Keywords: Paradiplomacy; Cooperation; Smart City; Sister City; Subnational Government

How to Cite: Puspitarini, R.C., Septiarika, F.T., & Bramastya, R. (2021). Praktik Paradiplomasi Dalam Implementasi Kerjasama Smart City Pemerintah Kota Bandung Dan Kota Seoul. PERSPEKTIF, 10(2): 569-577 *Corresponding author: E-mail: renniefb@gmail.com candradewi@upm.ac.id ISSN 2085-0328 (Print) ISSN 2684-9305(Online) Renny Candradewi Puspitarini, Fahrissy Tiko Septiarika, & Randy Bramastya, Praktik 570 PENDAHULUAN Paradiplomacy merupakan kajian baru dalam

ilmu hubungan internasional.

Paradiplomacy pertama kali muncul dalam perdebatan akademik pakar paradiplomasi yang mempopulerkan istilah ini di luar konsep microdiplomacy I. Duchacek (2019) dan Soldatos sekitar tahun 1980-an menanggapi (Liu & Song, 2020, p. 1-14) of non-central gover Paradiplomasi meliputi semua urusan di luar urusan yang diatur oleh pemerintah nasional atau non central governments, yakni urusan yang menjadi yurisdiksi pemerintah negara bagian dan provinsi seperti California (AS), Ontario (Kanada), Sao Paulo (Brazil), dan Bavaria (Jerman) terhadap kota mitra yang secara relatif biasanya lebih kecil.

Salah satu faktor suatu pemerintah federal dan provinsi melakukan paradiplomasi adalah, menurut Andre Lecours (2008) faktor ekonomi, politik dan unsur kerjasama lainnya (McHugh, 2015). Kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kota Kyoto Jepang diisi dengan pertukaran budaya, pertukaran pelajar, hingga kegiatan lomba lain yang membangun dan memperkuat kedekatan dua budaya. Paradiplomasi mengacu pada perilaku serta kapasitas guna melaksanakan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh aktor - natiataupemeri regional atau pemerintah daerah, dalam rangka memenuhi kepentingan mereka secara spesifik.

Paradiplomasi juga diartikan oleh McHugh sebagai sebutan lain pertemuan (summit) yang tidak dapat digolongkan ke dalam tradisi pertemuan (summit meeting) dalam konteks negara dan politik internasional. Ini adalah pondasi teoritis yang dibangun oleh Duchacek dan Aldecoa (Aldecoa & Keating, 1999; Dymont, 2012). Duchacek pertama kali yang memperkenalkan adanya peran subnational dalam berdiplomasi dengan pemerintahan lain. Penelitian ini berawal dari peran pemerintah Quebec yang terlibat dalam kegiatan untuk mempromosikan eksistensinya di luar batas negaranya (I. Duchacek, 1975).

Duchacek menjadi pakar paradiplomasi berpengaruh, meskipun nantinya Soldatos lebih mempopulerkan parallel diplomacy (paradiplomasi). Ia mengenalkan kerangka konseptual untuk menafsirkan aktivitas yang mana peran sub-national melengkapi peran negara sebagai aktor hubungan internasional (I. Duchacek, 1986). Menambahkan tentang konseptualisasi paradiplomasi, McHugh (McHugh, 2015), paradiplomasi menyediakan praktik untuk meluaskan tujuan-tujuan dan mencapai tujuan-tujuan diplomasi yang secara berkelanjutan yang menguntungkan aktor subnational government atau wilayah yurisdiksinya. Dalam tulisannya, McHugh menyebut aktor yang berperan dengan subnational government (McHugh, 2015). Ia juga menambahkan hubungan paradiplomasi dan diplomasi.

Paradiplomasi adalah metodologi diplomasi yang dilakukan oleh aktor sub national government untuk meluaskan claim sovereignty unity nya di luar yurisdiksinya atau bersifat cross border. Sejak 1960-an, Quebec mulai menguatkan perannya (seperti misi perwakilan yang dikenal sebagai Les Maisons Que'bec) yang dimaksudkan untuk mempromosikan dan memajukan klaimnya. Pada tahun 1960an, apa yang dilakukan oleh Quebec tampak menjadi fenomena baru di luar tradisi kerjasama dalam hubungan internasional.

Namun demikian, ini mencerminkan tren dalam hubungan internasional yang telah dimulai dan yang akan semakin populer sepanjang abad 21 bahkan telah semakin relevan hingga tahun 2020. Hal ini mengandung arti praktik diplomasi di luar tradisi diplomasi hubungan internasional mengambil peran yang semakin kuat dan relevan. Berdasarkan I. Duchacek (2018), McHugh (2015), Rodrigues and Mattioli (2017) dan Aldecoa and Keating (1999) yang kesemuanya menggunakan kata subnational government untuk merujuk pada pemerintahan kota atau pemerintahan daerah, maka tulisan ini menggunakan penyebutan yang sama untuk merujuk pada pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Kota Seoul.

Dalam hal ini, hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul merujuk pada Global Paradiplomacy, mengingat hubungan diplomasi yang dilakukan antara kedua kota tersebut berasal dari negara yang berbeda dan bahkan kawasan yang berbeda. Kota Bandung berasal dari Republik Indonesia berada di kawasan Asia tenggara, sementara Kota Seoul berasal dari Republik Korea Selatan yang PERSPEKTIF, 10(2) (2021): 569-577 571 berada di kawasan Asia Timur. Kedua pemerintah sub nasional tersebut bahkan tidak saling berbatasan secara langsung.

Konsep paradiplomacy telah dikemukakan oleh Panayotis Soldatos dan dikembangkan oleh Ivo Duchacek, yang kemudian menjadi pendekatan untuk menjelaskan permasalahan hubungan internasional oleh aktor subnasional (Liu et al., 2015). Penelitian tentang paradiplomasi tidak dapat dipungkiri cukup luas. Mattioli dan Rodrigues yang meneliti tentang aktivitas paradiplomasi di Mercocities Amerika Latin (2017) berpendapat bahwa paradiplomasi semakin lama semakin menguat perannya. Penelitian Duchacek menemukan paradiplomasi memperoleh kepopulerannya sejak pemerintah Quebec, Kanada, mulai aktif mempromosikan diri sebagai entitas subnational dan mulai memainkan peran- peran strategis.

Penelitian Duchacek menjadi penelitian penting bahwa aktor subnational dapat melakukan urusan di luar tradisi diplomasi selama ini dalam ranah hubungan internasional. Penelitian lain dilakukan oleh Ginanjar, Sinaga, Hidayat, and Akim (2020) juga meneliti paradiplomasi yang berperan dalam memaksimalkan peran pemerintah

Provinsi Jawa Barat dalam kemitraannya dengan Provinsi Chongqing. Penelitian ini bersifat penelitian dasar yang menekankan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber-sumber sekunder. Letak perbedaan dengan penelitian ini ada pada pendekatan yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang masih terbilang baru yakni meneliti upaya pemerintah Kota Bandung untuk realisasikan kerjasama Smart City dengan membedahnya menggunakan pendekatan Policy Transfer dan Policy Diffusion. Penelitian ini menghasilkan faktor yang mendorong peran Pemerintah Jawa Barat lebih optimal dalam kerangka kerjasama sister province dengan Chongqing. Adapun pendekatan teoritis yang digunakan adalah teori implementasi George Edwards III. Paradiplomasi juga dimaknai kurang lebih sama dengan microdiplomacy. Nagel menyebut terdapat perbedaan mendasar dalam diplomasi mikro, dibandingkan diplomasi makro.

Salah satunya adalah aturan internasional, perdagangan internasional, dan aturan yang terikat dengan pemerintahan domestik seringkali di dapat diperpendek. Lain halnya dengan diplomasi makro yang biasanya berkaitan dengan urusan internasional dan upaya penyelesaian konflik (I. D. Duchacek, Publius, States, & Autumn, 2018). Praktik diplomasi mikro yang paling mudah di temui adalah ketika suatu daerah dengan perangkatnya (personal) yang memainkan peran penting juga melakukan diplomasi setara dan negara.

Contoh riilnya adalah suatu daerah ketika sedang memperjuangkan kemerdekaannya atau self- determination, umumnya menggunakan praktik diplomacy ini (Bolewsky, 2007). Penelitian tentang paradiplomasi lain dilakukan oleh Darmayadi (2019). Penelitian ini meneliti tentang peluang dan potensi kerjasama antara pemerintahan Jawa Barat dengan kota Chongqing China dalam kemitraan Siser City. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini ialah membuka peluang kerjasama untuk memasarkan produk Jawa Barat di China, pengembangan infrastruktur, sektor industri, Research and Development, dan edukasi serta peluang kerjasama perdagangan lainnya.

Penelitian ini serupa dengan tulisan yang menceritakan secara kualitatif kerjasama Pemreintah Kota Surabaya dengan Kota Xiamen di China. Kerjasama ini meliputi pertukaran pelajar di bidang kultur dan sosial, serta pengiriman utusan dari pemerintah Kota Surabaya ke Xiamen dan sebaliknya. Pemerintah Surabaya seringkali mengundang pejabat Pemerintah Xiamen dalam beberapa event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Namun belum ada keterangan dan sumber sekunder yang dapat ditemukan jika kerjasama ini diikuti oleh adovakasi kebijakan dan proses policy transfer dan policy diffusion (Lilhata & Yayusman, 2018; Yuliantoro, 2018). Permasalahannya adalah tidak ada penelitian yang benar benar menekankan proses yang terjadi pada permusuna kerjasama. Bahwa dalam implementasi kerjasama terdapat proses policy transfer dan policy diffusion. Pendekatan in baru digunakan dalam penelitian oleh Mattioli dan Rodrigues.

Paradiplomasi di Indonesia antar kotanya dan kota lain dalam kawasan yang berbeda, menurut Duchacek (1988), belum dibedah menggunakan pendekatan milik Mattioli dan Renny Candradewi Puspitarini, Fahrisy Tiko Septiarika, & Randy Bramastya, Praktik 572 Rodrigues (2017). Sehingga penulis merasa, penelitian ini menjadi menarik ketika menggunakan pendekatan tersebut untuk meneliti upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan kerjasama Smart City dengan kota Seoul sebagai mitra Sister City-nya. Kerjasama Sister City adalah bentuk kerjasama yang dijalin antar kota atau provinsi di suatu negara dengan kota atau provinsi di negara lain.

Kerjasama yang dijalin antar kota atau provinsi dari dua negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, mempromosikan kebudayaan, serta saling menjalin kerjasama di berbagai bidang secara erat (Ginangar, Sinaga, Hidayat, & Akim, 2020). Dalam menjalin dalam kerjasama Sister City, setidaknya ada beberapa prinsip yang kemitraan dijadikan acuan untuk melakukan hubungan Sister City, meskipun antara satu kota dengan kota lainnya prinsip yang diterapkan dapat berbeda-beda (Kelowna, 2010). Mengutip dari Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Sister City yang dikeluarkan oleh Sister Cities Internasional, terdapat lima tahapan implementasi kerjasama Sister City.

Tahapan tersebut dapat dicermati pada gambar di bawah ini: Bagan 1 Tahap Tahap Perumusan Kerjasama Sister City Sumber: (Sister Cities, 2019) Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: (1) Similarities (adanya kesamaan bersama); (2) Exchanges (adanya potensi pertukaran atau transfer dalam segi budaya, edukasi, rekreasi, ataupun ekonomi); (3) Berorientasi pada masyarakat (adanya kepemimpinan yang aktif, serta keterlibatan dan dukungan oleh masyarakat, melalui organisasi atau bisnis- bisnis yang sudah ada untuk membangun dan memelihara hubungan yang sudah ada); (4) Hubungan timbal-balik (pertukaran yang sifatnya positif dan berjalan dari dua arah); (5) Manfaat strategis (manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang di dapat dari hubungan melebihi biaya publik yang harus dikeluarkan untuk menjalin ataupun memelihara hubungan yang sudah ada); (6) Eksklusivitas dan kedekatan (tidak memiliki hubungan Sister City dengan kota lainnya di negara yang sama atau lokasi yang berdekatan dari lokasi calon Sister City); (7) Kestabilan politik (kondisi politik yang stabil di negara tempat Sister City berada, sesuai dengan hasil pengumuman dari pemerintah pusat) (Nuralam, 2018).

Nuralam (2018, pp.

146) juga menjelaskan bahwa hubungan **kerjasama Sister City yang** terjalin antar pemerintah daerah ini memberi keuntungan seperti: (1) terdapat kesempatan dalam pengelolaan pembangunan dalam bidang kerjasama yang di sepakati melalui transfer knowledge dan experience; (2) Mendorong peran pemerintah daerah bersama dengan stakeholder lainnya untuk aktif dalam memunculkan ide baru; (3) Mempererat hubungan persahabatan antara negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dari kedua belah pihak; (4) adanya transfer culture yang dilakukan guna menambah kekayaan budaya daerah.

Akan tetapi, skema Sister City di sisi lain dapat menimbulkan faktor negatif, seperti meningkatnya beban keuangan negara atau daerah dalam memaknai kerjasama Sister City, selain itu waktu yang terhambat untuk menunggu fasilitas yang diberikan pemerintah pusat, dan juga berpotensi terjadinya ketidaksetaraan dalam kerjasama dimana hanya menguntungkan satu pihak saja. METODE PENELITIAN Bagian tulisan ini dimulai dengan intisari pendekatan liberalisme yang tidak membatasi adanya aktor lain di luar aktor negara sebagai unitary actor (aktor tunggal) dalam hubungan internasional.

Perdamaian dunia menurut liberalisme dapat diwujudkan dengan lebih mengedepankan kerjasama daripada konflik dan membuka ruang seluas-luasnya bagi aktor lain untuk juga terlibat dalam urusan luar negeri tidak hanya urusan domestik. Bagian tulisan ini mengajak untuk melihat Pemerintah Kota Bandung sebagai entitas subnational government yang diberi wewenang oleh kementerian luar negeri lewat Undang **Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan** Daerah, pada pasal 367 dan pasal 7 untuk melakukan urusan luar negeri seperti menjalin kerjasama. Konsep menjalankan wewenang untuk dapat melaksanakan fungsi urusan luar negeri yang diijinkan ini disebut dengan parallel diplomacy atau akrab dikenal dengan paradiplomasi.

Pemerintah Kota Bandung menerapkan paradiplomacy untuk dapat membangun kerjasama smart city dalam kemitraan Sister City. Dalam penelitian ini, peneliti melandaskan fokus penelitian pada praktik paradiplomasi dilaksanakan dalam upaya kerjasama Pemerintah Kota Bandung dan PERSPEKTIF, 10(2) (2021): 569-577 573 Pemerintah Kota Seoul. Manifestasi kerjasama ini mengambil wujud dalam mengenali setiap upaya pemerintah Kota Bandung dalam kerangka enam tahapan perumusan dan implementasi kerjasama sister city berdasarkan pedoman Sister City International organisasi non pemerintah yang mewadahi forum komunikasi pemimpin daerah negara-negara anggotanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil dan Pembahasan berisikan tentang Kajian pustaka yang

membahas tentang teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang menjadi landasan logis dalam mengembangkan hipotesis penelitian termasuk kerangka konsep penelitian. Serta di dalam hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah (scientific finding) yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh.

Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara saintifik, tidak hanya deskriptif, bila perlu ditunjang oleh fenomena-fenomena dasar ilmiah yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis penelitian di bagian pendahuluan. Menggunakan konseptualisasi tersebut, maka dikenali aktor yang paling signifikan terlibat adalah politisi terpilih yakni walikota sedang menjabat.

Aktor signifikan kedua adalah pebisnis diikuti oleh konsultan pada posisi berikutnya. Yang menjadikan temuan ini semakin menarik adalah kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat. Walikota tentunya memiliki motivasi yang berbeda dengan pebisnis maupun konsultan dalam menjalankan perannya. Upaya yang diberikan oleh masing-masing aktor pun terbilang cukup unik. Walikota memiliki motivasi yang terdiri atas sejumlah preferensi, tujuan-tujuan serta kapabilitas yang melekat. Motivasi Walikota Bandung dipengaruhi oleh kepribadiannya yang cukup visioner. Ia ingin melihat Kota Bandung agar memiliki wajah lebih baik.

Ia menyadari seluruh problem Kota Bandung karena ia tumbuh dan besar di Bandung. Pengalamannya yang diperoleh dengan belajar dan bekerja di Amerika Serikat membuat ia memiliki visi bagaimana baiknya Kota Bandung dikelola. Ia melihat terdapat solusi untuk mengatasi persoalan Kota Bandung yang sebagian besar terpusat pada tata kelola kota. Kota Bandung tidak dapat dipungkiri telah berkembang sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. Kota Bandung menjadi pusat bisnis, pusat wisata belanja dan kuliner, serta pusat fashion di wilayah Jawa Barat. Ia juga melihat potensi Kota Bandung dengan tata kelola dan manajemen yang baik dapat bersanding dengan kota-kota di negara maju.

Salah satunya ialah Kota Seoul yang berangkat dari similaritas yang sama meskipun masih terdapat nilai unik dan kearifan lokal yang sangat khas. Selain itu, saat ini tengah berkembang tren menuju tata kelola memanfaatkan perkembangan inovasi dan

teknologi serta mengajak masyarakat untuk lebih partisipatif dalam tata kelola kota. Hal ini juga tengah dilakukan oleh beberapa kota lain yakni Surabaya yang menjalin **sister city dengan Kota** Xiamen (Lilhata & Yayusman, 2018). Bisa dikatakan, tren tata kelola kota di Indonesia saat ini mencoba untuk mengikuti smart city.

Sister City hanyalah **salah satu program yang** kemudian dipilih dan dikembangkan sesuai dengan preferensi yang diinginkan. Untuk itu setelah terpilih sebagai walikota, Ridwan Kamil, kemudian bergerak untuk merancang sejumlah perbaikan dan restrukturisasi fasilitas-fasilitas di Bandung. Salah satunya adalah dengan sigap merancang inovasi kebijakan publik yang lebih dekat pada masyarakat. Ia pula segera mendorong jajarannya untuk segera menerapkan sistem administrasi dengan SSO atau Single Sign On.

Di saat yang sama, sebagaimana telah memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang arsitektur, Ridwan Kamil kemudian mulai merancang untuk memperbaiki wajah sungai-sungai di Bandung. Salah satu realisasinya Renny Candradewi Puspitarini, Fahrisyia Tiko Septiarika, & Randy Bramastya, Praktik 574 adalah revitalisasi Sungai Cikapundung. Revitalisasi sungai ini bermanfaat untuk memelihara kebersihan sekaligus menciptakan ruang terbuka, di saat yang sama juga mempromosikan kota yang lebih indah aman, dan bersih.

Di sisi penerapan inovasi dan teknologi, Bapak walikota sangat mendorong agar terdapat sejumlah titik Wi-Fi yang dapat diandalkan di sejumlah ruang terbuka publik di seluruh kota Bandung. Hal ini terealisasi melalui penambahan infrastruktur Taman Flexi sebutan yang diberikan pada ruang-ruang terbuka publik dengan fasilitas Wi-Fi hingga taman Film di Jalan Layang Pasupati. Sedangkan pebisnis, memiliki motif yang berorientasi keberlanjutan usaha dan **keuntungan yang dapat diperoleh** di masa depan. Motif pebisnis sangat mudah dikenali. Pebisnis yang terlibat sesuai dengan hasil wawancara sebagian besar berasal dari Korea Selatan.

Wawancara belum menemukan apakah terdapat pebisnis asli Kota Bandung yang kemudian tertarik untuk **menjalin kerjasama dengan Kota** Seoul dengan lokasi investasi di Kota Seoul. Sedangkan di Kota Bandung, beberapa kali terdapat implementasi kerjasama dalam berbagai program yang dilaksanakan di Kota Bandung. Sejumlah kerjasama tersebut telah disampaikan pada bagian tulisan sebelumnya. Kerjasama ini tertuang pada kolom Smart Living. Adapun kerjasamanya terdiri atas kunjungan delegasi Korean Exim Bank bersama tim KSP Dissemination seminar, investor dari Posco Steel Korea, dan kemitraan dengan perusahaan swasta yakni PT Total Solution Intelligent.

Selain itu juga terdapat komunikasi yang terjadi dalam pertemuan ASEAN Connectivity Forum bersama Korea Selatan yang digagas oleh kedua pihak yang di dalamnya mengundang pebisnis Korea Selatan untuk menjajaki peluang berinvestasi dalam pembangunan proyek LRT. Motivasi ini erat dengan kepentingan ekonomi. Masih membuka sejumlah pertanyaan apakah ada kesepakatan di balik adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah Kota Bandung dengan pebisnis dari Korea Selatan. Motif ini dapat dijelaskan menggunakan perspektif liberalisme ekonomi dan neoliberalisme ekonomi bahkan menggunakan pendekatan kapitalisme. Namun, persoalan tidak dijelaskan lebih lanjut karena bukan bagian dari ruang lingkup penelitian.

Karena itu, bermanfaat sebagai ruang untuk penelitian selanjutnya. Inti dari kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan pebisnis Seoul adalah untuk mengenalkan ruang kerjasama bersama yang dapat memberi keuntungan yang bersifat win-win solution. Sejauh ini kerjasama Indonesia lewat pemerintah nasional sebagian besar telah didominasi cukup lama oleh investor dari negeri Jepang. Sedangkan negeri China baru datang dalam dua dekade ini untuk kemudian menjadi sumber diversifikasi investasi yang masuk ke Indonesia. Korea Selatan masih merupakan pemain baru di bidang investasi di Indonesia.

Pengaruhnya pun baru menguat pasca kedatangan Hallyu Wave ke Indonesia, membuat kehadiran pengaruh Korea Selatan menjadi lebih signifikan. Peran konsultan dan kontribusinya cukup strategis. Dalam merumuskan dan mendesain smart city, pemerintah Kota Bandung telah menjalin kerjasama dengan konsultan ahli di bidang Smart City. Meskipun informasi tentang konsultan tersebut tidak disebutkan secara rinci oleh informan dalam proses wawancara, peneliti berhasil menemukan produk dari konsultan yang memuat master plan pengembangan desain smart city Kota Bandung.

Fungsi konsultan tidak berpengaruh langsung dengan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif pemerintah daerah terkait dengan program smart city dan sister city. Konsultan berperan untuk melakukan kajian dan mengukur peluang pengembangan smart city yang bermanfaat untuk mengukur peluang kemitraan Sister City. Master plan teknis seperti yang terangkum dalam suatu city profiling yang komplisit dan komprehensif di saat yang sama juga visibel untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Produk konsultan tersebut bermanfaat sebagai bahan kajian yang diperlukan untuk kemudian melangkah ke pengembangan Smart City yang lebih serius sekaligus melihat dengan lebih ambisius di masa mendatang. Peran dan upaya konsultan dapat ditelusuri pada penjelasan yang mana terdapat upaya untuk menjalin komunikasi dalam proses policy transfer diffusion yakni advokasi dari LAPI Institute Teknologi Bandung. PERSPEKTIF, 10(2) (2021): 569-577 575 Sedangkan peran konsultan di pihak Kota Seoul

dilaksanakan dengan melibatkan lembaga independen yang disebut dengan KSP atau Knowledge Sharing Program.

Knowledge Sharing Program adalah salah satu lembaga yang dibentuk di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi Pemerintah Korea Selatan. KSP bermanfaat untuk menyediakan advokasi kebijakan sehingga transfer dan difusi kebijakan berjalan sesuai dengan koridor yang disepakati dengan tidak meninggalkan keuntungan dan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Berdasarkan paparan tersebut, maka analisis peran aktor spesifik menurut Mattioli dan Rodrigues (2017) telah dirinci.

Sedangkan berdasarkan tipe aktor yang terdiri atas tiga yakni internal, eksternal dan go-between, dapat diidentifikasi sebagai berikut: Peran aktor tipe internal yang sangat berperan dalam mendorong upaya realisasi kerjasama Smart City dan Kemitraan Sister City adalah walikota Bandung dan walikota Seoul. Upaya komunikasi aktif untuk menjemput advokasi kebijakan dilakukan Pemerintah Kota Bandung atas instruksi dan visi misi Walikota terpilih. Sedangkan peran aktor tipe eksternal terletak pada pemerintah Kota Seoul yang sejumlah kebijakan terkait inovasi di kebijakan publik diadopsi dan ditransfer kepada Pemerintah Kota Bandung.

Sedangkan peran aktor go-between lebih mudah dikenali pada aktor seperti konsultan **Pemerintah Kota Bandung yang** mengerjakan Rencana Induk Pengembangan Smart City Kota Bandung. Sedangkan pada sisi Seoul ditemukan pada sejumlah pebisnis selaku investor yang dilibatkan dalam berbagai pertemuan delegasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Seoul di beberapa tempat berbeda. Peran aktor go-between juga dapat dikenali melalui peran KSP sebagai salah satu badan advokasi yang ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Ekonomi Korea Selatan.

Selain itu juga terdapat badan seperti KOFICE (Korea Foundation for Internasional Culture Exchange) yang menjembatani dialog kemitraan sister city di bidang pertukaran budaya. Salah satu realisasinya masih pada mutualisme membangun Little Seoul atau Korea Street di Kota Bandung dan Little Bandung di Seoul. Policy Diffusion Policy diffusion mengandung arti dimana suatu pemerintahan subnational membuat keputusan untuk mengadopsi inovasi kebijakan yang dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintahan subnational di negara lain (Rodrigues & Mattioli, 2017). Untuk mengetahui proses kerjasama Smart City dalam kemitraan Sister City dalam proses ini tidak mudah dikenali. Hal ini disebabkan Kota Seoul memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan Kota Bandung.

Kota Seoul adalah ibukota negara sekaligus pusat seluruh kegiatan bisnis, ekonomi,

hiburan, pariwisata dan lainnya yang membuatnya memiliki preferensi tinggi untuk dapat menjadi kota yang nyaman sekaligus inovatif. Dengan tuntutan itu, Kota Seoul berkembang lebih progresif di bidang penerapan inovasi dan teknologi. Sehingga rumusan kebijakan yang diimplementasikan Kota Seoul cukup canggih state of the art. Melihat situasi demikian, maka penelitian ini menyimpulkan proses difusi yang terjadi yang mana kategorinya jatuh pada copying, emulation, dan combination membutuhkan suatu penilaian dengan pertimbangan tertentu.

Pemerintah Kota Bandung berpedoman dengan visi dan misi walikota terpilih memiliki peta jalan dan master plan menjadi kota yang visioner dan bermartabat – mengutip dari motto Kota Bandung sendiri. Kebijakan yang diterapkan oleh Kota Bandung, belum dapat dinilai apakah sudah terpengaruh secara langsung oleh setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh Kota Seoul. Terdapat sejumlah persoalan struktural yang ditemukan, berdasarkan hasil observasi peneliti. Persoalan tersebut terletak pada tingkat partisipasi masyarakat yang tidak sepenuhnya bergerak secara digital.

Masyarakat juga tidak bergerak secara fleksibel sehingga pergerakan manusia masih cukup terbatas. Hal ini juga dikarenakan profil Kota Bandung yang tidak setara dengan profil suatu ibukota. Sebagai tambahan, Kota Bandung hanyalah ibukota provinsi dan tidak menjadi ibu kota suatu negara. Dengan demikian proses copying, tidak benar-benar terjadi dan belum memiliki bukti fisik yang mendukung. Namun demikian, bukan berarti policy diffusion tidak terjadi. Perkembangan Kota Seoul sebagai Sister City Kota Bandung tetap menginspirasi Kota Bandung.

Inspirasi ini berasal dari Renny Candradewi Puspitarini, Fahriska Tiko Septiarika, & Randy Bramastya, Praktik 576 keinginan Kota Bandung untuk memiliki Light Rapid Transportation meskipun Kota Seoul bukan satu-satunya yang memiliki LRT. Kota Seoul diundang dalam memberikan advokasi kebijakan dan masukan secara profesional pengembangan LRT Kota Bandung di masa depan. Dengan tipe diffusion, combination dan emulation lebih cenderung terjadi daripada copying. Proses combination dan emulation ini dapat terjadi jika meneliti kasus per kasus inovasi. Pemerintah Indonesia, belakangan ini sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membangun jalan akan pengenalan inovasi dan electronic government.

Sama halnya dengan pemerintahan di negara maju yang semua tata kelola saat ini telah terintegrasi secara utuh secara lintas kementerian, departemen dan pemerintah daerah secara seamlessly. Menyimpulkan tentang ini, jadi upaya pemerintah kota Bandung sebagian besar adalah melakukan kombinasi kebijakan yang idenya berasal dari advokasi kebijakan yang diperoleh dari Seoul melalui institusi yang ditunjuk misalnya KOFICE dan KSP. Sebagai catatan, dalam perumusan transportasi terpadu rute bus KSP

menjadi institusi advokasi kebijakan yang paling berperan aktif.

Tidak hanya di tingkat subnational government, KSP juga memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan Indonesia tentang sejumlah kajian yang diperlukan. Semua data tersebut dapat diakses melalui situs resmi KSP yakni <http://ksp.go.kr>. Berdasarkan tipe output, juga terdapat kebijakan **pemerintah Kota Bandung yang** terinspirasi dan menerapkan perubahan inovasi yang diperoleh dari advokasi KSP, namun demikian banyak kebijakan ini memiliki output berbeda dari rumusan masukan di awal. Salah satunya adalah kebijakan ketika revitalisasi sungai di kota Bandung di lakukan. Idenya ingin mewujudkan inovasi bagaimana pemerintah Kota Seoul merubah sungai yang melintas di tengah kota seoul menjadi pusat destinasi jalan-jalan yang menarik.

SIMPULAN Pemerintah Kota Bandung meskipun tidak menyatakan secara tersurat telah melakukan praktik paradiplomasi, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah Kota Bandung telah menerapkan tiga prinsip penting yang telah menjadi karakter dari paradiplomasi. Tiga prinsip ini yang membedakan dengan praktik diplomasi tradisional yang mana dipahami sebagai suatu diplomasi yang dilakukan oleh negara sebagai aktor tunggal hubungan internasional dalam menjalankan urusan-urusan luar negerinya. Lewat Undang **Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**.

Hal ini telah memenuhi prinsip pertama dalam paradiplomasi yakni ada alih wewenang dari pemerintah nasional kepada pemerintah subnasional untuk menjalankan urusan kerjasama luar negeri secara langsung dengan pemerintah kota negara lain (I. Duchacek, 2018, 2019a, 2019b). Prinsip kedua lainnya yakni, peran kuat pemerintah subnasional untuk melakukan berbagai tindakan dan kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari implementasi kerjasama dengan pemerintah kota negara lain (I. D. Duchacek, Publius, States, & Autumn, 2018). Hal ini tertuang dalam berbagai pertemuan antara Pemerintah Kota Bandung dengan lembaga advokasi kebijakan pemerintah Korea Selatan yakni Knowledge Sharing Program.

Prinsip ketiga yakni kegiatan yang menjadi representasi aktivitas transnasional menurut Keohane and Nye (2003). Praktik diplomasi ini dikenali dalam setiap tahapan perumusan kerjasama Smart City lewat kemitraan **Sister City dengan Kota** Seoul. Salah satu bukti nyatanya ialah adanya proses transfer kebijakan dan difusi kebijakan dalam proses advokasi kebijakan dari pemerintah Kota Seoul ke Pemerintah Kota Bandung. Beberapa programnya antara lain advokasi kebijakan dalam program: 2017/18 KSP Policy Consultation: Support for the Establishment of Bus System Reform Strategy in Bandung, Indonesia.

A Final report (KSP Policy Consultation III, 2018), pembangunan The Little Seoul di Kota Bandung, pembangunan the Little Bandung di Kota Seoul, dan restorasi Sungai Cikapundung. DAFTAR PUSTAKA Aldecoa, F., & Keating, M. (1999). *Paradiplomacy in action: the foreign relations of subnational governments*. Bolewsky, W. (2007). [Diplomacy and International Law in Globalized Relations]. Darmayadi, A. (2019). Potential Cooperation Between West Java Provincial Government and the City of Chongqing in the Framework PERSPEKTIF, 10(2) (2021): 569-577 577 of sister province. 225(Icobest), 72-77. doi: 10.2991/icobest-18.2018.17 Duchacek, I. (1975).

External and Internal Challenges to the Federal Bargain. CrossRef Listing of Deleted DOIs. doi: 10.2307/3329427 Duchacek, I. (1986). International competence of subnational governments: Borderlines and beyond. In O. J. Martinez (Ed.), (pp. 22-41). El Paso: Texas Western Press. Duchacek, I. (2018). The International Dimension of Subnational Self-Government Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/3330188> Linked references are available on JSTOR for this article : The International Dimension of Subnational Self-Government. 14(4), 5-31. Duchacek, I. (2019). The territorial dimension of politics within, among, and across nations. Duchacek, I. D.,

Publius, S., States, F., & Autumn, I. R. (2018). The International Dimension of Subnational Self-Government Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/3330188> Linked references are available on JSTOR for this article : The International Dimension of Subnational Self-Government. 14(4), 5-31. Dymment, D. (2012). ALDECOA, Francisco et Michael KEATING (dir.). *Paradiplomacy in Action : The Foreign Relations of Subnational Governments* London, Frank Cass Publishers, 1999,223 p. Études internationales. doi: 10.7202/704258ar Ginanjar, Y., Sinaga, O., Hidayat, T., & Akim. (2020).

Optimising the role of the West Java provincial government in partnering with the sister province of chongqing. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 12(11), 471-484. Kelowna, C. O. (2010). Council Policy of Sister Cities. Keohane, R., & Nye, J. S. (2003). Transnational Relations and World Politics. International Organization, 3, 337-341. KSP Policy Consultation III. (2018). 2017/18 KSP Policy Consultation: Support for the Establishment of Bus System Reform Strategy in Bandung, Indonesia. A Final report (M. o. E. a. F. K. (MFOK), Trans.). In K. P. Consultation (Ed.), Phase III (Vol. III). Seoul: Knowledge Sharing Program.

Lecours, A. (2008). Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World. Discussion papers in diplomacy. Lilihata, J. F., & Yayusman, M. S. (2018). Diplomasi Kota dalam Mewujudkan Zhongguo Meng: Hubungan China-Indonesia ditinjau melalui kerjasama kota Kembar antara Surabaya- Xiamen dan Semarang-Beihai. In N. R.

Yuliantoro & H. Akbar (Eds.), *Menghadapi Kebangkitan China*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Liu, T., & Song, Y. (2020). Chinese Paradiplomacy: A Theoretical Review. *SAGE Open*, 10(1). doi: 10.1177/2158244019899048

Liu, T., Song, Y., Rodrigues, G. M. A., Mattioli, T., Lloyd, C. R., The, S., . . . Smith, S. (2015). Introduction. *Http://Kemdikbud.Go.Id/*, 53(021), 393-413. doi: 10.1177/2158244019899048

McHugh, J. T. (2015). Paradiplomacy, protodiplomacy and the foreign policy aspirations of Quebec and other Canadian Provinces. *Canadian Foreign Policy Journal*, 21(3), 238-256. doi: 10.1080/11926422.2015.1031261

Nuralam. (2018). Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green-City. *Journal Of Applied Business Administration*, 2(1), 144-151.

Rodrigues, G. M. A., & Mattioli, T. (2017).

Paradiplomacy, Security Policies and City Networks: the Case of the Mercocities Citizen Security Thematic Unit. *Contexto Internacional*, 39(3), 569-587. doi: 10.1590/s0102-8529.2017390300006

Sister Cities, I. (2019). *Guide to establishing sister city relationships*.

Yuliantoro, N. R. (2018). *Menghadapi Kebangkitan Cina*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

INTERNET SOURCES:

<1% - <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/download/%234616/3375>

4% - <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/%234850/0>

<1% - <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/index>

<1% -

https://www.academia.edu/4332144/PROSES_PENYELESAIAN_SENGKETA_INDONESIA_DI_WTO_TERKAIT_PEMBATASAN_IMPORT_HORTIKULTURA_DAN_DAGING_SAPI

<1% - <https://www.kedirikota.go.id/kategori/berita/130>

<1% -

<http://lppm.unjani.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/75-79-Angga-Nurdin-Rachmat-FI-SIP-Unjani.pdf>

<1% -

<https://123dok.com/document/lq5817q4-perjanjian-internasional-kaitannya-kerjasama-bersaudara-pemerintah-pemerintah-ichikawa.html>

1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/229849532.pdf>

<1% - <https://issuu.com/tifaoundation/docs/ketikaagamabawadamai-web>

<1% - <http://eprints.ums.ac.id/36823/5/BAB%20I.pdf>

1% -

https://www.academia.edu/22648308/PETUNJUK_PENULISAN_DAN_KIRIM_ARTIKEL_JURNAL_TEKNIK_MULAI_PENERBITAN_TAHUN_2014_14pt_Bold_Istadi_Istadi_Luqman_Buchori_12pt_Bold_Abstrak_12pt_Bold

1% - https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/FIJ/article/download/6334/pdf_57

<1% -

https://www.academia.edu/40765874/KONSEP_DAN_KAJIAN_TEORI_PERUMUSAN_KEBIJAKAN_PUBLIK

<1% - <https://idoc.pub/documents/annual-report-2015-bank-mega-34m7e6rr2z46>

<1% -

<https://123dok.com/document/qmjnen5q-efektifitas-implementasi-pemerintah-surabaya-melaksanakan-kerjasama-sister-busan.html>

<1% - <https://sosiopublika.wordpress.com/>

<1% -

<https://text-id.123dok.com/document/dzx5v84q-penerapan-corporate-social-responsibility-terhadap-pemberdayaan-masyarakat-studi-pada-pt-tirta-investama.html>

<1% -

<https://adoc.pub/prosiding-seminar-dan-konferensi-nasional-ilmu-komunikasi.html>

<1% - https://issuu.com/opendatabdg/docs/lkpj_tahun_2019_-_isi

<1% - <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53262/perpu-no-2-tahun-2014>

<1% - <https://www.scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2706914>

<1% - https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91995-9_14